

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
(BAPENDA)**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) T.A 2023**

T.A. 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen yang memuat Rencana Kerja yang terdiri dari gambaran umum, tugas pokok serta visi, misi dan sasaran kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin selama satu tahun.

Disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun isinya, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.

Rantau, Juni 2022

Kepala BAPENDA,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP

NIP.19680415 199002 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
a. Pengertian Renja	2
b. Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	17
2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	22
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	27
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	28
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAPENDA	31
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	33
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33
b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sd Tahun 2020 Kabupaten Tapin	11
TABEL 2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN	18
TABEL 3	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah ..	19
TABEL 4	Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020	21
TABEL 5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 .	23
TABEL 6	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah.....	28
TABEL 7	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 KABUPATEN TAPIN Badan Pendapatan Daerah.....	36
TABEL 8	Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai unit kerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab mengelola di bidang Pendapatan Asli Daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BAPENDA yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Renja

Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di

dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

b. Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan dalam ruang lingkup untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan sebuah penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang dimana RENSTRA merupakan rencana pembangunan jangka waktu selama 5 (lima) tahunan.

Baik Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah bagian dari system perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu karena system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang tersistematis dan terpadu. Maka dari itu tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- v. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tahun 2023 Kabupaten Tapin.

a. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman kerja tahun 2023 bagi SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2023 yaitu:

- Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BAPENDA;

- Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan BAPENDA;
- Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
- Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan capaian Tahun 2023.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-Perubahan SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi mengenai program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan putcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2023-2 = 2021 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 dapat dilihat pada table 1:

TABEL 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sd Tahun 2021 Kabupaten Tapin

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin

Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	7.030.878.583	100	6.321.122.981	100	89,91
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	23.779.900	100	12.979.900	100	54,58
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	12.799.800	3	1.999.800	100	15,62
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	1	1.999.800	100	100
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	1	1.999.800	100	100

2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4.980.700	4	4.980.700	100	100
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.999.800	3	1.999.800	100	100
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	Persen	100	3.987.582.197	100	3.795.269.827	100	95,18
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.958.561.097	12	3.776.213.627	100	95,39
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	24.321.100	12	14.400.000	100	59,21
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.800.000	2	2.756.200	100	98,44
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	1.900.000	12	1.900.000	100	100
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.154.386.100	100	1.871.290.495	100	86,86

2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	67.358.300	12	59.440.500	100	88,25
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	342.119.600	12	289.872.100	100	84,73
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	119.070.700	12	86.690.500	100	72,81
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	592.855.900	12	496.235.500	100	83,70
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Pameran	1	6.148.600	0	0,00	0	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	22.440.000	12	3.805.000	100	16,96
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	1.004.393.000	12	935.246.895	100	93,12
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	Persen	100	170.473.600	100	142.618.000	100	83,66

5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Paket	1	22.784.500	1	22.268.000	100	97,73
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	147.689.100	1	120.350.000	100	81,49
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	500.020.086	100	335.897.331	100	67,18
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	461.220.086	12	307.097.331	100	66,58
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38.800.000	12	28.800.000	100	74,23
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	Persen	100	194.636.700	100	163.067.428	100	83,78
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	58.718.700	12	49.972.428	100	85,10

2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	54.970.000	12	44.095.000	100	80,22
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	80.948.000	12	69.000.000	100	85,24
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen	100	1.877.350.764	100	1.031.851.510	100	54,96
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	1.877.350.764	100	1.031.851.510	100	54,96
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persen	0,50	449.896.600	3,52	46.200.000	704	10,27
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	24	738.034.164	24	634.743.110	100	86,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persen	0,50	267.295.000	3,52	48.204.000	704	18,03
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	2	38.500.000	2	11.688.900	100	30,36
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Persen	100	186.000.000	167	108.540.500	167	58,36

5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persen	2	197.625.000	2,30	182.475.000	115	92,33
Jumlah					8.908.229.347		7.352.974.491		82,54

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel:

TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	-	-	1,60	1,60	1,60	-	8,45	1,60	1,60	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,05	0,05	0,50	0,50	0,50	1,44	1,11	0,50	0,50	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	0,67	0,67	0,67	-	3,21	0,67	0,67	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	-	-	0,50	0,50	0,50	-	35,61	0,50	0,50	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	33,00	33,00	33,00	-	126,79	33,00	33,00	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,10	91,75	80,00	80,00	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target

TABEL 3 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

No.	Kinerja Utama/Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Penjelasan/ Form Perhitungan IIndikator	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	<p>Penjelasan : Jumlah Objek Pajak tahun berjalan dikurang Jumlah Objek Pajak tahun lalu dibagi Jumlah Objek Pajak tahun lalu dikali 100.</p> <p>Rumus : $\frac{(\sum OP n - \sum OP n-1)}{\sum OP n-1} \times 100\%$</p>	0,50%	Laporan Jumlah Objek Pajak Baru.	Kabid Pendataan dan Penetapan
2	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	<p>Penjelasan : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahun lalu dikali 100.</p> <p>Rumus : $\frac{(\sum PPD n - \sum PPD n-1)}{\sum PPD n-1} \times 100\%$</p>	0,67%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Pendataan dan Penetapan

3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Penjelasan : Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah PAD tahun lalu dikali 100. Rumus : $\frac{(\Sigma PAD n - \Sigma PAD n-1)}{\Sigma PAD n-1} \times 100\%$	0,50%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Penagihan dan Pengendalian
4		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penjelasan : Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di bagi Target PAD dikali 100. Rumus : $\frac{\Sigma RPAD}{\Sigma TPAD} \times 100\%$	33%		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Penjelasan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan WP terhadap pelayanan pajak daerah. Rumus : Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan.	100	Laporan Hasil Survei.	Kabid Pembukuan dan Pelayanan

TABEL 4 Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60	8,45	528,13
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50	1,11	222,00
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67	3,21	479,10
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50	35,61	7.122,00
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33,00	126,7897	384,21
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80,00	91,75	114,69
Rata - rata Capaian IKU			1.475,02		
Kinerja Capaian Sasaran			Sangat Berhasil		

2.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BAPENDA, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis BAPENDA sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
- c. Penyampaian RKA dan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu;
- d. Regulasi keuangan yang selalu berubah;
- e. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bapenda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Nama SKPD : SKPD BAPENDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASIONAL					BELANJA OPERASIONAL					
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai disusun.	100	13.015.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai disusun.	100	13.015.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5.015.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5.015.400	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	100	5.822.878.430	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	100	5.822.878.430	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin Kab.	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin Kab.	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin Kab.	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin Kab.	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	2.800.000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.097.778.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.097.778.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	67.301.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	67.301.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	303.694.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	303.694.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	119.111.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	119.111.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	571.355.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	571.355.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.140.900	Penyediaan Bahan/Material	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.140.900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tapin Kab.	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tapin Kab.	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin Kab.	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.024.675.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin Kab.	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.024.675.000	

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin Kab.	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	100	199.652.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin Kab.	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	100	199.652.700	
	Pengadaan Mebel	Tapin Kab.	Jumlah Paket Pengadaan Mabel	1 Paket	46.278.200	Pengadaan Mebel	Tapin Kab.	Jumlah Paket Pengadaan Mabel	1 Paket	46.278.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	153.374.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	153.374.500	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	455.306.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	455.306.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	416.506.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	416.506.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.800.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	100	322.277.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	100	322.277.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	67.387.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	67.387.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	54.970.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	54.970.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	199.920.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	199.920.000	

VII	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tapin Kab.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.530.905.232	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tapin Kab.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.530.905.232	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	208.324.900	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	208.324.900	
	Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	74.999.800	Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	74.999.800	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Bulan	294.816.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Bulan	294.816.600	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Bulan	713.360.204	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Bulan	713.360.204	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tapin Kab.	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 Bulan	389.933.728	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tapin Kab.	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 Bulan	389.933.728	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Bulan	267.295.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Bulan	267.295.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	38.500.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	38.500.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	186.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	186.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	357.675.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	357.675.000	
JUMLAH					11.441.812.762	JUMLAH					11.441.812.762

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tapin

Nama SOPD : SOPD XXX

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2022 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara,
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan,
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumberdaya alamnya maupun sebagai bagian dari Internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumberdaya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

- a. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan system pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
- b. Lumbung energy nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energy baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

- c. Pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
- d. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

- a. Pengembangan hilirisasi komoditas batubara serta pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
- b. Penyediaan infrastruktur wilayah;
- c. Peningkatan SDM sertailmudan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
- d. Shifting struktur perekonomian daerah
- e. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi

- f. Ketahanan Pangan
- g. Ketahanan Energi
- h. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
- i. Bonus Demografi
- j. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAPENDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD BAPENDA selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD BAPENDA pada dokumen Rencana Kerja (Renja 2023) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
T.1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah					1,60	1,60	1,60
S.1.1		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).					0,50	0,50	0,50
S.1.2			Persentase Penerimaan Pajak Daerah					0,67	0,67	0,67
S.1.3			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	80		5	5	0,50	0,50	0,50
S.1.4			Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)					33,00	33,00	33,00
S.2			Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	83		80,00	80,00	80,00	80,00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 beserta prognosinya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - c) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - d) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - e) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- f) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- g) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- h) Penagihan Pajak Daerah
- i) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

**TABEL 7 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KABUPATEN TAPIN Badan Pendapatan Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APB N	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah						11.445.412.762	0	0		12.017.683.400
x	Semua Urusan										
x.xx	Semua Bidang										
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat (%)	100%	8.910.907.530	0	0	100%	9.356.452.907
					Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran (%)	80%				800%	
					Persentase efisiensi penggunaan anggaran (%)	90%				90%	
					Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%				90%	
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen	100%	13.015.400	0	0	100%	13.666.170

					perencanaan						
				TAPIN	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%				100%	
				TAPIN	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000	0	0	3 Dokumen	2.100.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	0	0	1 Dokumen	2.100.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	0	0	1 Dokumen	2.100.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan	2.000.000	0	0	4 Laporan	2.100.000

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.015.400	0	0	3 Laporan	5.266.170
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	5.822.878.430	0	0	100%	6.114.022.352
				TAPIN	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%				100%	
				TAPIN	persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%				100%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	5.581.467.530	0	0	264 Orang/bulan	5.860.540.907
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1749 Dokumen	235.810.900	0	0	1749 Dokumen	247.601.445
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.800.000	0	0	1 Laporan	2.940.000

X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.800.000	0	0	2 Laporan	2.940.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.097.778.000	0	0	100%	2.202.666.900
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	67.301.000	0	0	2 Paket	70.666.050
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	303.694.000	0	0	12 Paket	318.878.700
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Bapenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	119.111.500	0	0	12 Paket	125.067.075
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	571.355.600	0	0	12 Paket	599.923.380
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kantor Bapenda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.140.900	0	0	1 Paket	6.447.945
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000	0	0	12 Laporan	5.775.000

X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.024.675.000	0	0	12 Laporan	1.075.908.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100%	199.652.700	0	0	100%	209.635.335
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kantor Bapenda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	46.278.200	0	0	50 Unit	48.592.110
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	153.374.500	0	0	10 Unit	161.043.225
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	455.306.000	0	0	100%	478.071.300
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	416.506.000	0	0	12 Laporan	437.331.300
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.800.000	0	0	12 Bulan	40.740.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	322.277.700	0	0	100%	338.390.850
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kend. Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	67.387.000	0	0	13 Unit	70.756.350

X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	338 Unit	54.970.000	0	0	338 Unit	57.718.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.920.000	0	0	1 Unit	209.916.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1.60%	2.534.505.232	0	0	1.60%	2.661.230.494
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			TAPIN	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0.50%	2.534.505.232	0	0	0.50%	2.661.230.494
				TAPIN	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0.67%				0.67%	
				TAPIN	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.50%				0.50%	
				TAPIN	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33%				33%	
				TAPIN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah	80 Nilai				80 Nilai	

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	208.324.900	0	0	4 Dokumen	218.741.145
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	74.999.800	0	0	1 Laporan	78.749.790
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	294.816.600	0	0	4 Laporan	309.557.430
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	716.960.204	0	0	24 Laporan	752.808.214
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kantor Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Objek Pajak	389.933.728	0	0	3000 Objek Pajak	409.430.414
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen	267.295.000	0	0	8000 Dokumen	280.659.750
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200 Layanan	38.500.000	0	0	1200 Layanan	40.425.000

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1900 Dokumen	186.000.000	0	0	1900 Dokumen	195.300.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	357.675.000	0	0	4 Dokumen	375.558.750

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Pendapatan Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pendapatan Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 8 Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.445.412.762
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.534.505.232
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.534.505.232
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	294.816.600
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	716.960.204
Penagihan Pajak Daerah	186.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.999.800
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.933.728
Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	208.324.900
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	357.675.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.910.907.530
Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.015.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.400
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	5.822.878.430
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	235.810.900
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.581.467.530
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.800.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.097.778.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1.024.675.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000
Penyediaan Bahan/Material	6.140.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.301.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.111.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	571.355.600

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.277.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.387.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.652.700
Pengadaan Mebel	46.278.200
Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	153.374.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.306.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.506.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.800.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BAPENDA Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD BAPENDA dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD BAPENDA maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja BAPENDA Kabupaten Tapin tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2019-2023 yaitu: **"Bersama Mewujudkan Tapin maju, Sejahtera dan Agamis"**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
(BAPENDA)**

**RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA) T.A 2023**

T.A. 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen yang memuat Rencana Kerja yang terdiri dari gambaran umum, tugas pokok serta visi, misi dan sasaran kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin selama satu tahun.

Disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun isinya, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.

Rantau, Maret 2022

Kepala BAPENDA,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP

NIP.19680415 199002 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
a. Pengertian Renja	2
b. Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	17
2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	22
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	27
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	28
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAPENDA	31
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	33
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33
b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sd Tahun 2020 Kabupaten Tapin	11
TABEL 2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN	18
TABEL 3	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah ..	19
TABEL 4	Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020	21
TABEL 5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 .	23
TABEL 6	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah.....	28
TABEL 7	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 KABUPATEN TAPIN Badan Pendapatan Daerah.....	36
TABEL 8	Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai unit kerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab mengelola di bidang Pendapatan Asli Daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BAPENDA yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Renja

Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di

dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

b. Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan dalam ruang lingkup untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan sebuah penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang dimana RENSTRA merupakan rencana pembangunan jangka waktu selama 5 (lima) tahunan.

Baik Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah bagian dari system perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu karena system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang tersistematis dan terpadu. Maka dari itu tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- v. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tahun 2023 Kabupaten Tapin.

a. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman kerja tahun 2023 bagi SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2023 yaitu:

- Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BAPENDA;

- Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan BAPENDA;
- Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
- Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan capaian Tahun 2023.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-Perubahan SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi mengenai program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan putcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2023-2 = 2021 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 dapat dilihat pada table 1:

TABEL 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sd Tahun 2021 Kabupaten Tapin

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin

Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	7.030.878.583	100	6.321.122.981	100	89,91
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	23.779.900	100	12.979.900	100	54,58
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	12.799.800	3	1.999.800	100	15,62
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	1	1.999.800	100	100
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	1	1.999.800	100	100

2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4.980.700	4	4.980.700	100	100
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.999.800	3	1.999.800	100	100
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	Persen	100	3.987.582.197	100	3.795.269.827	100	95,18
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.958.561.097	12	3.776.213.627	100	95,39
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	24.321.100	12	14.400.000	100	59,21
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.800.000	2	2.756.200	100	98,44
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	1.900.000	12	1.900.000	100	100
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.154.386.100	100	1.871.290.495	100	86,86

2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	67.358.300	12	59.440.500	100	88,25
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	342.119.600	12	289.872.100	100	84,73
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	119.070.700	12	86.690.500	100	72,81
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	592.855.900	12	496.235.500	100	83,70
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Pameran	1	6.148.600	0	0,00	0	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	22.440.000	12	3.805.000	100	16,96
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	1.004.393.000	12	935.246.895	100	93,12
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	Persen	100	170.473.600	100	142.618.000	100	83,66

5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Paket	1	22.784.500	1	22.268.000	100	97,73
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	147.689.100	1	120.350.000	100	81,49
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	500.020.086	100	335.897.331	100	67,18
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	461.220.086	12	307.097.331	100	66,58
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38.800.000	12	28.800.000	100	74,23
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	Persen	100	194.636.700	100	163.067.428	100	83,78
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	58.718.700	12	49.972.428	100	85,10

2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	54.970.000	12	44.095.000	100	80,22
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	80.948.000	12	69.000.000	100	85,24
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen	100	1.877.350.764	100	1.031.851.510	100	54,96
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	1.877.350.764	100	1.031.851.510	100	54,96
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persen	0,50	449.896.600	3,52	46.200.000	704	10,27
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	24	738.034.164	24	634.743.110	100	86,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persen	0,50	267.295.000	3,52	48.204.000	704	18,03
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	2	38.500.000	2	11.688.900	100	30,36
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Persen	100	186.000.000	167	108.540.500	167	58,36

5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persen	2	197.625.000	2,30	182.475.000	115	92,33
Jumlah					8.908.229.347		7.352.974.491		82,54

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel:

TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	-	-	1,60	1,60	1,60	-	8,45	1,60	1,60	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,05	0,05	0,50	0,50	0,50	1,44	1,11	0,50	0,50	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	0,67	0,67	0,67	-	3,21	0,67	0,67	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	-	-	0,50	0,50	0,50	-	35,61	0,50	0,50	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	33,00	33,00	33,00	-	126,79	33,00	33,00	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,10	91,75	80,00	80,00	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target

TABEL 3 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

No.	Kinerja Utama/Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Penjelasan/ Form Perhitungan IIndikator	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	<p>Penjelasan : Jumlah Objek Pajak tahun berjalan dikurang Jumlah Objek Pajak tahun lalu dibagi Jumlah Objek Pajak tahun lalu dikali 100.</p> $\text{Rumus} : \frac{(\sum OP n - \sum OP n-1)}{\sum OP n-1} \times 100\%$	0,50%	Laporan Jumlah Objek Pajak Baru.	Kabid Pendataan dan Penetapan
2	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	<p>Penjelasan : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahun lalu dikali 100.</p> $\text{Rumus} : \frac{(\sum PPD n - \sum PPD n-1)}{\sum PPD n-1} \times 100\%$	0,67%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Pendataan dan Penetapan

3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Penjelasan : Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah PAD tahun lalu dikali 100. Rumus : $\frac{(\Sigma PAD n - \Sigma PAD n-1)}{\Sigma PAD n-1} \times 100\%$	0,50%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Penagihan dan Pengendalian
4		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penjelasan : Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di bagi Target PAD dikali 100. Rumus : $\frac{\Sigma RPAD}{\Sigma TPAD} \times 100\%$	33%		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Penjelasan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan WP terhadap pelayanan pajak daerah. Rumus : Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan.	100	Laporan Hasil Survei.	Kabid Pembukuan dan Pelayanan

TABEL 4 Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60	8,45	528,13
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50	1,11	222,00
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67	3,21	479,10
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50	35,61	7.122,00
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33,00	126,7897	384,21
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80,00	91,75	114,69
Rata - rata Capaian IKU			1.475,02		
Kinerja Capaian Sasaran			Sangat Berhasil		

2.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BAPENDA, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis BAPENDA sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
- c. Penyampaian RKA dan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu;
- d. Regulasi keuangan yang selalu berubah;
- e. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bapenda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Nama SKPD : SKPD BAPENDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASIONAL					BELANJA OPERASIONAL					
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai disusun.	100	13.015.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai disusun.	100	13.015.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5.015.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5.015.400	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	100	5.822.878.430	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	100	5.822.878.430	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin Kab.	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin Kab.	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin Kab.	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin Kab.	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	2.800.000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.097.778.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.097.778.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	67.301.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	67.301.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	303.694.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	303.694.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	119.111.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	119.111.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	571.355.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	571.355.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.140.900	Penyediaan Bahan/Material	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.140.900	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tapin Kab.	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tapin Kab.	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin Kab.	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.024.675.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin Kab.	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.024.675.000	

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin Kab.	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	100	199.652.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin Kab.	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	100	199.652.700	
	Pengadaan Mebel	Tapin Kab.	Jumlah Paket Pengadaan Mabel	1 Paket	46.278.200	Pengadaan Mebel	Tapin Kab.	Jumlah Paket Pengadaan Mabel	1 Paket	46.278.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	153.374.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	153.374.500	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	455.306.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	455.306.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	416.506.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	416.506.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.800.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	100	322.277.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	100	322.277.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	67.387.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	67.387.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	54.970.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	54.970.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	199.920.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	199.920.000	

VII	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tapin Kab.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.530.905.232	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tapin Kab.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.530.905.232	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	208.324.900	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	208.324.900	
	Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	74.999.800	Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	74.999.800	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Bulan	294.816.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Bulan	294.816.600	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Bulan	713.360.204	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Bulan	713.360.204	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tapin Kab.	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 Bulan	389.933.728	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tapin Kab.	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 Bulan	389.933.728	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Bulan	267.295.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Bulan	267.295.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	38.500.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	38.500.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	186.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	186.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	357.675.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	357.675.000	
JUMLAH					11.441.812.762	JUMLAH					11.441.812.762

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tapin

Nama SOPD : SOPD XXX

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2022 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara,
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan,
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumberdaya alamnya maupun sebagai bagian dari Internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumberdaya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

- a. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan system pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
- b. Lumbung energy nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energy baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

- c. Pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
- d. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

- a. Pengembangan hilirisasi komoditas batubara serta pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
- b. Penyediaan infrastruktur wilayah;
- c. Peningkatan SDM sertailmudan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
- d. Shifting struktur perekonomian daerah
- e. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi

- f. Ketahanan Pangan
- g. Ketahanan Energi
- h. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
- i. Bonus Demografi
- j. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAPENDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD BAPENDA selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD BAPENDA pada dokumen Rencana Kerja (Renja 2023) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
T.1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah					1,60	1,60	1,60
S.1.1		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).					0,50	0,50	0,50
S.1.2			Persentase Penerimaan Pajak Daerah					0,67	0,67	0,67
S.1.3			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	80		5	5	0,50	0,50	0,50
S.1.4			Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)					33,00	33,00	33,00
S.2			Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	83		80,00	80,00	80,00	80,00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 beserta prognosinya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - c) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - d) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - e) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- f) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- g) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- h) Penagihan Pajak Daerah
- i) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

**TABEL 7 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KABUPATEN TAPIN Badan Pendapatan Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APB N	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah						11.591.381.961	0	0		12.170.951.059
x	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	8.910.907.530	0	0	100%	9.397.931.190
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Dokumen	13.015.400	0	0	13 Dokumen	13.629.000

				TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan dan semesteran akhir tahun (Dokumen)	2 Dokumen				2 Dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kantor Bapenda	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kantor Bapenda	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Waktu evaluasi kinerja perangkat daerah (Penyusunan LKIP Bapenda)	12 Bulan	5.015.400	0	0	12 Bulan	5.229.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 bulan	5.822.878.430	0	0	12 bulan	6.155.448.030
				TAPIN	waktu Peningkatan Pelayanan PPKD	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Bapenda	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	0	0	12 Bulan	5.902.019.085
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kantor Bapenda	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	0	0	12 Bulan	247.548.945

X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	2.800.000	0	0	12 Bulan	2.940.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Bulan	2.800.000	0	0	12 Bulan	2.940.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	2.097.778.000	0	0	12 Bulan	2.293.627.875
				TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TAPIN EXPO	1 Kali				1 Kali	
				TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	67.301.000	0	0	12 Bulan	70.726.215
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	303.694.000	0	0	12 Bulan	320.803.980
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	119.111.500	0	0	12 Bulan	125.068.545

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kantor Bapenda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	571.355.600	0	0	12 Bulan	599.989.005
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kantor Bapenda	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	6.140.900	0	0	12 Bulan	6.456.030
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kantor Bapenda	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	5.500.000	0	0	12 Bulan	5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Bapenda	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	1.024.675.000	0	0	12 Bulan	1.164.809.100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan rumah tangga (unit/buah/paket)	1 paket	199.652.700	0	0	1 paket	207.996.600
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kantor Bapenda	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	46.278.200	0	0	12 Bulan	48.381.480
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	153.374.500	0	0	12 Bulan	159.615.120
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	455.306.000	0	0	12 bulan	388.836.000
				TAPIN	waktu Pembuatan data organisasi kantor	12 bulan				12 bulan	
				TAPIN	waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan				12 bulan	
				TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	12 Bulan				12 Bulan	

X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Bapenda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	416.506.000	0	0	12 Bulan	348.096.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Bapenda	Tersusunnya akuntansi dan pelaporan keuangan dan waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	38.800.000	0	0	12 Bulan	40.740.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kantor	12 Bulan	322.277.700	0	0	12 Bulan	338.393.685
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala genset	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala Software	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Bapenda	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	67.387.000	0	0	12 Bulan	70.759.185
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	54.970.000	0	0	12 Bulan	57.718.500

X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Bapenda	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	199.920.000	0	0	12 Bulan	209.916.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Persentase peningkatan objek pajak baru	0,05 OP	2.534.505.232	0	0	0,05 OP	2.773.019.869
					Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	5%				5%	
					Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100%				100%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			TAPIN	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak dan retribusi daerah	360 wajib pajak	2.534.505.232	0	0	360 wajib pajak	2.773.019.869
				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4 laporan				4 laporan	
				TAPIN	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	360 surat				360 surat	
				TAPIN	Jumlah Surat-Surat berharga yang di cetak	5710 buku				5710 buku	

				TAPIN	Kesesuaian Data NJOP PBB-P2	6012 Wajib Pajak				6012 Wajib Pajak	
				TAPIN	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah	475 OPSWalet				475 OPSWalet	
				TAPIN	Waktu Sosialisasi PBB-P2	12 bulan				12 bulan	
				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi dari wajib pajak	24 laporan				24 laporan	
				TAPIN	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	12 dokumen				12 dokumen	
				TAPIN	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	12 laporan				12 laporan	
				TAPIN	Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	12 laporan				12 laporan	
				TAPIN	Jumlah Laporan target pendapatan	2 dokumen				2 dokumen	
				TAPIN	Jumlah lap Penyusunan Lap Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen				12 dokumen	

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Kantor Bapenda	waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	12 bulan	208.324.900	0	0	12 bulan	287.909.790
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan	74.999.800	0	0	12 bulan	78.749.790
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya penyusunan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	1 Paket	294.816.600	0	0	1 Paket	375.581.430
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	1 Paket	716.960.204	0	0	1 Paket	575.279.569
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kantor Bapenda	waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 bulan	389.933.728	0	0	12 bulan	524.999.790
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah	1 Paket	267.295.000	0	0	1 Paket	280.659.750

5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi	1 Paket	38.500.000	0	0	1 Paket	40.425.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	1 Paket	186.000.000	0	0	1 Paket	195.300.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	1 Paket	357.675.000	0	0	1 Paket	414.114.750

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Pendapatan Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pendapatan Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 8 Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.591.381.961
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.534.505.232
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.534.505.232
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	294.816.600
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	716.960.204
Penagihan Pajak Daerah	186.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.999.800
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.933.728
Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	208.324.900
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	357.675.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.910.907.530
Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.015.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.400
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	5.822.878.430
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	235.810.900
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.581.467.530
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.800.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.097.778.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1.024.675.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000
Penyediaan Bahan/Material	6.140.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.301.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.111.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	571.355.600

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.277.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.387.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.652.700
Pengadaan Mebel	46.278.200
Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	153.374.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.306.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.506.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.800.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BAPENDA Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD BAPENDA dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD BAPENDA maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja BAPENDA Kabupaten Tapin tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2019-2023 yaitu: **"Bersama Mewujudkan Tapin maju, Sejahtera dan Agamis"**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
(BAPENDA)**

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RENJA) T.A 2023**

T.A. 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen yang memuat Rencana Kerja yang terdiri dari gambaran umum, tugas pokok serta visi, misi dan sasaran kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin selama satu tahun.

Disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun isinya, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.

Rantau, Februari 2022

Kepala BAPENDA,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP

NIP.19680415 199002 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
a. Pengertian Renja	2
b. Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	17
2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	22
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	27
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	28
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAPENDA.....	31
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33
b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sd Tahun 2020 Kabupaten Tapin	11
TABEL 2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN	18
TABEL 3	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah ..	19
TABEL 4	Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020	21
TABEL 5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020.	23
TABEL 6	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah.....	28
TABEL 7	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 KABUPATEN TAPIN Badan Pendapatan Daerah	36
TABEL 8	Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai unit kerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab mengelola di bidang Pendapatan Asli Daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BAPENDA yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Renja

Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di

dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

b. Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan dalam ruang lingkup untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan sebuah penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang dimana RENSTRA merupakan rencana pembangunan jangka waktu selama 5 (lima) tahunan.

Baik Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah bagian dari system perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu karena system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang tersistematis dan terpadu. Maka dari itu tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 - n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

- Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
 - v. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tahun 2023 Kabupaten Tapin.

a. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman kerja tahun 2023 bagi SKPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2023 yaitu:

- Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BAPENDA;
- Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan BAPENDA;
- Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
- Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan capaian Tahun 2023.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-Perubahan SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi mengenai program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan putcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2023-2 = 2021 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 dapat dilihat pada table 1:

TABEL 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sd Tahun 2021 Kabupaten Tapin

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin

Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	7.030.878.583	100	6.321.122.981	100	89,91
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	23.779.900	100	12.979.900	100	54,58
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	12.799.800	3	1.999.800	100	15,62
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	1	1.999.800	100	100
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.800	1	1.999.800	100	100

2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4.980.700	4	4.980.700	100	100
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.999.800	3	1.999.800	100	100
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	Persen	100	3.987.582.197	100	3.795.269.827	100	95,18
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.958.561.097	12	3.776.213.627	100	95,39
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	24.321.100	12	14.400.000	100	59,21
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.800.000	2	2.756.200	100	98,44
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	1.900.000	12	1.900.000	100	100
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.154.386.100	100	1.871.290.495	100	86,86

2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	67.358.300	12	59.440.500	100	88,25
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	342.119.600	12	289.872.100	100	84,73
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	119.070.700	12	86.690.500	100	72,81
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	592.855.900	12	496.235.500	100	83,70
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Pameran	1	6.148.600	0	0,00	0	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	22.440.000	12	3.805.000	100	16,96
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	1.004.393.000	12	935.246.895	100	93,12
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	Persen	100	170.473.600	100	142.618.000	100	83,66

5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Paket	1	22.784.500	1	22.268.000	100	97,73
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	147.689.100	1	120.350.000	100	81,49
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	500.020.086	100	335.897.331	100	67,18
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	461.220.086	12	307.097.331	100	66,58
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38.800.000	12	28.800.000	100	74,23
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	Persen	100	194.636.700	100	163.067.428	100	83,78
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	58.718.700	12	49.972.428	100	85,10

2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	54.970.000	12	44.095.000	100	80,22
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	80.948.000	12	69.000.000	100	85,24
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen	100	1.877.350.764	100	1.031.851.510	100	54,96
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	1.877.350.764	100	1.031.851.510	100	54,96
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persen	0,50	449.896.600	3,52	46.200.000	704	10,27
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	24	738.034.164	24	634.743.110	100	86,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persen	0,50	267.295.000	3,52	48.204.000	704	18,03
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	2	38.500.000	2	11.688.900	100	30,36
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Persen	100	186.000.000	167	108.540.500	167	58,36

5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persen	2	197.625.000	2,30	182.475.000	115	92,33
Jumlah					8.908.229.347		7.352.974.491		82,54

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel:

TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	-	-	1,60	1,60	1,60	-	8,45	1,60	1,60	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,05	0,05	0,50	0,50	0,50	1,44	1,11	0,50	0,50	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	0,67	0,67	0,67	-	3,21	0,67	0,67	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	-	-	0,50	0,50	0,50	-	35,61	0,50	0,50	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	33,00	33,00	33,00	-	126,79	33,00	33,00	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,10	91,75	80,00	80,00	Realisasi 2020 dan Proyeksi 2020-2021 memkai angka target

TABEL 3 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

No.	Kinerja Utama/Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Penjelasan/ Form Perhitungan IIndikator	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	<p>Penjelasan : Jumlah Objek Pajak tahun berjalan dikurang Jumlah Objek Pajak tahun lalu dibagi Jumlah Objek Pajak tahun lalu dikali 100.</p> <p>Rumus : $\frac{(\sum OP n - \sum OP n-1)}{\sum OP n-1} \times 100\%$</p>	0,50%	Laporan Jumlah Objek Pajak Baru.	Kabid Pendataan dan Penetapan
2	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	<p>Penjelasan : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahun lalu dikali 100.</p> <p>Rumus : $\frac{(\sum PPD n - \sum PPD n-1)}{\sum PPD n-1} \times 100\%$</p>	0,67%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Pendataan dan Penetapan

3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Penjelasan : Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah PAD tahun lalu dikali 100. Rumus : $\frac{(\Sigma PAD n - \Sigma PAD n-1)}{\Sigma PAD n-1} \times 100\%$	0,50%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Penagihan dan Pengendalian
4		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penjelasan : Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di bagi Target PAD dikali 100. Rumus : $\frac{\Sigma RPAD}{\Sigma TPAD} \times 100\%$	33%		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Penjelasan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan WP terhadap pelayanan pajak daerah. Rumus : Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan.	100	Laporan Hasil Survei.	Kabid Pembukuan dan Pelayanan

TABEL 4 Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60	8,45	528,13
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50	1,11	222,00
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67	3,21	479,10
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50	35,61	7.122,00
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33,00	126,7897	384,21
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80,00	91,75	114,69
Rata - rata Capaian IKU			1.475,02		
Kinerja Capaian Sasaran			Sangat Berhasil		

2.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BAPENDA, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis BAPENDA sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
- c. Penyampaian RKA dan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu;
- d. Regulasi keuangan yang selalu berubah;
- e. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bapenda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Nama SKPD : SKPD BAPENDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASIONAL					BELANJA OPERASIONAL					
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai disusun.	100	13.015.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selesai disusun.	100	13.015.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5.015.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5.015.400	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	100	5.822.878.430	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai disusun	100	5.822.878.430	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin Kab.	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin Kab.	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin Kab.	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin Kab.	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tapin Kab.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	2.800.000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.097.778.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.097.778.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	67.301.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	67.301.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	303.694.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	303.694.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	119.111.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	119.111.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	571.355.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	571.355.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.140.900	Penyediaan Bahan/Material	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.140.900	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tapin Kab.	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tapin Kab.	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin Kab.	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.024.675.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin Kab.	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.024.675.000	

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin Kab.	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	100	199.652.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin Kab.	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai dilaksanakan	100	199.652.700	
	Pengadaan Mebel	Tapin Kab.	Jumlah Paket Pengadaan Mabel	1 Paket	46.278.200	Pengadaan Mebel	Tapin Kab.	Jumlah Paket Pengadaan Mabel	1 Paket	46.278.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	153.374.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	153.374.500	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	455.306.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	455.306.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	416.506.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	416.506.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.800.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	100	322.277.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Kab.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai dilaksanakan	100	322.277.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	67.387.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin Kab.	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	67.387.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	54.970.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	54.970.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	199.920.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin Kab.	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	199.920.000	

VII	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tapin Kab.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.530.905.232	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tapin Kab.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.530.905.232	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	208.324.900	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	208.324.900	
	Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	74.999.800	Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Peyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Bulan	74.999.800	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Bulan	294.816.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Bulan	294.816.600	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Bulan	713.360.204	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Bulan	713.360.204	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tapin Kab.	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 Bulan	389.933.728	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tapin Kab.	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 Bulan	389.933.728	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Bulan	267.295.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Bulan	267.295.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	38.500.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	38.500.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	186.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Penagihan Pajak Daerah	12 Bulan	186.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	357.675.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tapin Kab.	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan	357.675.000	
JUMLAH					11.441.812.762	JUMLAH					11.441.812.762

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tapin

Nama SOPD : SOPD XXX

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2022 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara,
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan,
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

- h. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumberdaya alamnya maupun sebagai bagian dari Internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumberdaya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

- a. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan system pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
- b. Lumbung energy nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energy baru

- terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- c. Pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
 - d. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

- a. Pengembangan hilirisasi komoditas batubara serta pengembangan industry berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
- b. Penyediaan infrastruktur wilayah;
- c. Peningkatan SDM sertailmudan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

- d. Shifting struktur perekonomian daerah
- e. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
- f. Ketahanan Pangan
- g. Ketahanan Energi
- h. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
- i. Bonus Demografi
- j. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAPENDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD BAPENDA selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD BAPENDA pada dokumen Rencana Kerja (Renja 2023) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
T.1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah					1,60	1,60	1,60
S.1.1		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).					0,50	0,50	0,50
S.1.2			Persentase Penerimaan Pajak Daerah					0,67	0,67	0,67
S.1.3			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	80		5	5	0,50	0,50	0,50
S.1.4			Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)					33,00	33,00	33,00
S.2			Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	83		80,00	80,00	80,00	80,00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 beserta prognosisnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - c) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - d) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

- e) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- f) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- g) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- h) Penagihan Pajak Daerah
- i) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

**TABEL 7 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KABUPATEN TAPIN Badan Pendapatan Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APB N	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah						11.591.381.961	0	0		12.170.951.059
x	Semua Urusan										
x.xx	Semua Bidang										
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	8.910.907.530	0	0	100%	9.397.931.190
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%				100%	
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Dokumen	13.015.400	0	0	13 Dokumen	13.629.000

				TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan dan semesteran akhir tahun (Dokumen)	2 Dokumen				2 Dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kantor Bapenda	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kantor Bapenda	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Waktu evaluasi kinerja perangkat daerah (Penyusunan LKIP Bapenda)	12 Bulan	5.015.400	0	0	12 Bulan	5.229.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 bulan	5.822.878.430	0	0	12 bulan	6.155.448.030
				TAPIN	waktu Peningkatan Pelayanan PPKD	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Bapenda	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	5.581.467.530	0	0	12 Bulan	5.902.019.085
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kantor Bapenda	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	235.810.900	0	0	12 Bulan	247.548.945

X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	2.800.000	0	0	12 Bulan	2.940.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Bulan	2.800.000	0	0	12 Bulan	2.940.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	2.097.778.000	0	0	12 Bulan	2.293.627.875
				TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TAPIN EXPO	1 Kali				1 Kali	
				TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	67.301.000	0	0	12 Bulan	70.726.215
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	303.694.000	0	0	12 Bulan	320.803.980
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	119.111.500	0	0	12 Bulan	125.068.545

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kantor Bapenda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	571.355.600	0	0	12 Bulan	599.989.005
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kantor Bapenda	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	6.140.900	0	0	12 Bulan	6.456.030
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kantor Bapenda	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	5.500.000	0	0	12 Bulan	5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Bapenda	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	1.024.675.000	0	0	12 Bulan	1.164.809.100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan rumah tangga (unit/buah/paket)	1 paket	199.652.700	0	0	1 paket	207.996.600
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kantor Bapenda	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	46.278.200	0	0	12 Bulan	48.381.480
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	153.374.500	0	0	12 Bulan	159.615.120
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	455.306.000	0	0	12 bulan	388.836.000
				TAPIN	waktu Pembuatan data organisasi kantor	12 bulan				12 bulan	
				TAPIN	waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan				12 bulan	
				TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	12 Bulan				12 Bulan	

X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Bapenda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	416.506.000	0	0	12 Bulan	348.096.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Bapenda	Tersusunnya akuntansi dan pelaporan keuangan dan waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	38.800.000	0	0	12 Bulan	40.740.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kantor	12 Bulan	322.277.700	0	0	12 Bulan	338.393.685
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala genset	12 Bulan				12 Bulan	
				TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala Software	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Bapenda	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	67.387.000	0	0	12 Bulan	70.759.185
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	54.970.000	0	0	12 Bulan	57.718.500

X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Bapenda	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	199.920.000	0	0	12 Bulan	209.916.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Persentase peningkatan objek pajak baru	0,05 OP	2.534.505.232	0	0	0,05 OP	2.773.019.869
					Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	5%				5%	
					Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100%				100%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			TAPIN	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak dan retribusi daerah	360 wajib pajak	2.534.505.232	0	0	360 wajib pajak	2.773.019.869
				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4 laporan				4 laporan	
				TAPIN	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	360 surat				360 surat	
				TAPIN	Jumlah Surat-Surat berharga yang di cetak	5710 buku				5710 buku	

				TAPIN	Kesesuaian Data NJOP PBB-P2	6012 Wajib Pajak				6012 Wajib Pajak	
				TAPIN	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah	475 OPSWalet				475 OPSWalet	
				TAPIN	Waktu Sosialisasi PBB-P2	12 bulan				12 bulan	
				TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi dari wajib pajak	24 laporan				24 laporan	
				TAPIN	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	12 dokumen				12 dokumen	
				TAPIN	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	12 laporan				12 laporan	
				TAPIN	Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	12 laporan				12 laporan	
				TAPIN	Jumlah Laporan target pendapatan	2 dokumen				2 dokumen	
				TAPIN	Jumlah lap Penyusunan Lap Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen				12 dokumen	

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Kantor Bapenda	waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	12 bulan	208.324.900	0	0	12 bulan	287.909.790
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan	74.999.800	0	0	12 bulan	78.749.790
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya penyusunan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	1 Paket	294.816.600	0	0	1 Paket	375.581.430
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	1 Paket	716.960.204	0	0	1 Paket	575.279.569
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kantor Bapenda	waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 bulan	389.933.728	0	0	12 bulan	524.999.790
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah	1 Paket	267.295.000	0	0	1 Paket	280.659.750

5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi	1 Paket	38.500.000	0	0	1 Paket	40.425.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	1 Paket	186.000.000	0	0	1 Paket	195.300.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	1 Paket	357.675.000	0	0	1 Paket	414.114.750

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Pendapatan Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pendapatan Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 8 Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.591.381.961
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.534.505.232
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.534.505.232
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	294.816.600
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	716.960.204
Penagihan Pajak Daerah	186.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.999.800
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.933.728
Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	208.324.900
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	357.675.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.910.907.530
Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.015.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.400
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	5.822.878.430
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	235.810.900
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.581.467.530
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.800.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.097.778.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1.024.675.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000
Penyediaan Bahan/Material	6.140.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.301.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.111.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	571.355.600

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.277.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.387.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.652.700
Pengadaan Mebel	46.278.200
Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	153.374.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.306.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.506.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.800.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BAPENDA Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD BAPENDA dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD BAPENDA Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD BAPENDA maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja BAPENDA Kabupaten Tapin tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2019-2023 yaitu: **"Bersama Mewujudkan Tapin maju, Sejahtera dan Agamis"**.

